

CRITICAL REVIEW: Peasant Labour and Capitalist Production in Late Colonial Indonesia: The 'Campaign' at a North Java Sugar Factory, 1840-1870

Fajar Santoso

Magister Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Email: santosofajar1998@gmail.com

*Korespondensi



Received: 10-02-2024, Revised: 28-05-2025, Accepted: 28-05-2025, Published: 30-05-2025



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.



Judul:

Peasant Labour and Capitalist Production in Late Colonial Indonesia: The 'Campaign' at a North Java Sugar Factory, 1840-1870

Penulis:

G. R. Knight

Penerbit:

Journal of Southeast Asian Studies, Volume 19, Issue 2

Tebal:

20 halaman

Tahun Terbit:

September 1988

DOI:

<https://doi.org/10.1017/S0022463400000552>

Artikel G. R. Knight yang berjudul "Buruh Tani dan Produksi Kapitalis Akhir Kolonial di Indonesia: 'Campaign'/Kerja Pasca Panen Budidaya Tebu di Pabrik Gula Jawa Utara, 1840-1870" sangatlah menarik. Namun jika dilihat dari segi judul, aspek spasial artikel ini sangatlah luas yakni Jawa bagian utara. Hal itu tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan Knight pada bagian isi yang hanya mengambil studi kasus di Wonopringgo, salah satu daerah di Pekalongan. Jika demikian selayaknya Knight langsung mengatakan daerah Wonopringgo atau Pekalongan. Namun jika menggunakan terminologi Jawa Utara, menurut hemat penulis menggunakan lebih dari satu studi kasus. Hal itu dikarenakan apa yang terjadi di Wonopringgo tidak kemudian dapat disamakan dengan apa yang terjadi di Jawa Utara bagian timur atau barat. Sehingga akan lebih menarik mungkin jika artikel ini menggunakan pembandingan dengan Jawa Utara bagian timur dan barat misalnya apa yang terjadi di Pasuruan dan Cirebon. Penulis menggunakan teori strukturalisme untuk melihat tulisan Riger Knight ini. Strukturalisme menjadikan suatu peristiwa di dalam masyarakat menjadi suatu keseluruhan karena ada relasi timbal balik antara

bagian-bagian maupun antar bagian dan keseluruhan. Strukturalisme adalah cara mencari realitas tidak dalam hal-hal individu, tetapi dalam hubungan di antara mereka. Dalam hal ini, strukturalisme seperti objek yang masuk ke dalam objek lain yang antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan (Manshur, 2019). Terdapat dua kata kunci utama dari artikel ini, yakni kapitalis dan 'campaign' buruh tani. Oleh karena itu, dua hal ini yang akan kemudian penulis jabarkan lebih lanjut untuk artikel ini secara utuh.

Kapitalis: Produksi Penanaman Tebu di Wonopringgo

Jawa merupakan penghasil gula terbesar kedua untuk pasar dunia setelah Kuba. Oleh karena itu tidak mengherankan jika kolonial mendirikan industri gula dengan diawali produksi penanaman tebu. Industri gula secara modern muncul sejak tanam paksa diberlakukan Van den Bosch pada 1830-an. Sebanyak 27.000 hektar lahan pertanian diminta oleh kolonial untuk menyediakan tebu bagi mereka. Hegemoni perusahaan masuk hingga ke pedalaman desa, bahkan ketika masa puncak produksi gula pada awal 1860-an, sebanyak 100.000 petani terlibat dalam penanaman tebu untuk industri. Banyak para ahli menyebut bahwa proyek gula kolonial ini menganut sistem kapitalis. Industri gula di Jawa adalah campuran dari perusahaan kapitalis Barat dengan tanah dan tenaga prakapitalis Timur. Industri perkebunan di Jawa dibangun atas paksaan non-ekonomi oleh pengaruh pemerintah kolonial. Gordon berpendapat bahwa industri gula di Jawa bukan kapitalisme murni, bahkan di fase akhir kolonial muncul cara produksi khusus yang disebut dengan kapitalisme hibrida. Kapitalisme dan prakapitalisme hidup berdampingan dalam perkembangan sosio-ekonomi pedesaan Jawa dalam era kolonial akhir.

Sistem tanam paksa yang diterapkan pada pertengahan abad 19 digunakan untuk meningkatkan ekspor produk kolonial. Di dalam pelaksanaan sistem ini, terdapat peran elit Jawa yang menguasai buruh tani. Penduduk pedesaan dipaksa untuk menyediakan tanaman ekspor melalui perantara antara priyayi dan kepala desa. Aspek ini yang kemudian membuat para sejarawan mengidentifikasikan sebagai "paksaan" dari para produsen dengan organisasi buruh yang pada dasarnya adalah sistem pra kapitalis. Dalam hal industri gula, organisasi kerja sangatlah kompleks, penanaman tebu saja misalnya adalah salah satu dari bagian yang memakan tenaga kerja. Bisnis penanaman tebu berada di tangan pejabat Karesidenan Belanda dan bawahan priyayi Jawa. Terdapat pula jabatan kontraktor dan pemegang konsesi (kebanyakan orang Eropa) yang bertugas untuk menjalankan 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu. 'Campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu yang dimaksud dalam hal ini adalah untuk melakukan kerja pada bulan tertentu setelah panen tebu yang masak. Tebu tersebut dicungkil dengan peralatan tangan dan diangkut menggunakan kereta atau gerbong untuk dikirim ke pabrik dan diproses lebih lanjut. Melalui kontrak yang disepakati, pemerintah kolonial memberi modal kerja dan bahan mentah untuk mendirikan pabrik gula. Pemerintah kolonial kemudian mengikat mereka dengan mengirimkan sebagian hasil produksi ke gudang pemerintah.

Pada daerah Wonopringgo sendiri terdapat konflik kepentingan antara kaum kapitalis baru dan penerima manfaat dari tatanan ekonomi. Kaum kapitalis bermaksud untuk memperluas produksi, sedang kepala desa atau priyayi harus

memastikan bahwa hasil kerja paksa memadai untuk kebutuhan kolonial. Terdapat beberapa kesulitan yang terjadi seperti tuntutan layanan tenaga kerja dari elit desa yang menghalangi rekrutmen 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu. Konflik antar kelompok mengenai akses buruh tani lokal juga terjadi, ditangani oleh pemerintah kolonial namun kembali menguntungkan bagi industri gula. Kelompok ini terdiri dari para petani yang melaksanakan kewajiban kerja rodi mereka dan dikumpulkan melalui agen priyayi dan kepala desa, yang atas perintah Residen, mengirimkan sejumlah orang yang dibutuhkan setiap hari. Hal yang sama berlaku untuk pemotong tebu yang dibutuhkan di perkebunan. Hanya dalam urusan pengangkutan tebu yang penting, pabrik dibiarkan berjalan sendiri, dan bahkan di sana pun tangan Residen tidak pernah jauh. Sistem kuli pemerintahan adalah alat untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu dari kategori petani yang dipisahkan dari kepemilikan atau kendali atas alat-alat produksi, tetapi perkembangannya menjadi proletariat yang matang sepenuhnya dihambat oleh kendala tatanan sosial dan ekonomi pedesaan.

Meningkatnya kebutuhan kaum tani akan uang tunai yang disediakan untuk bekerja di industri menjadikan tenaga kerja mau direkrut dalam industri gula. Petani yang tak bertanah bisa bekerja dengan menggarap lahan milik tuan tanah. Nantinya mereka akan mendapat upah dari pabrik dan para tuan tanah. Upah pabrik lebih sedikit jumlahnya dari tuan tanah yang mencapai dua kali lipat upah pabrik. Ini menunjukkan bahwa kerja rodi sebenarnya didasarkan pada semacam kerja upahan yang dilakukan oleh orang-orang tak bertanah dan bukan pada pengambilan tenaga kerja dari petani. Pada saat kuli pemerintah akhirnya ditarik dari Wonopringgo pada tahun 1866, di desa-desa sudah ada sejumlah besar petani yang bergantung pada buruh 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu untuk sebagian besar penghidupan mereka.

Sebuah Kritik Atas Konsep Kapitalisme Dalam Artikel Roger Knight

Kapitalisme adalah bagaimana orang berjuang untuk mencari kapital. Dalam hal artikel ini, kapitalisme terlihat bagaimana kolonial menjadikan gula sebagai produk ekspor melalui tanam paksa. Namun tenaga buruh yang diambil dalam industri gula tersebut tidak diberi upah yang layak. Das capital menurut pandangan Marx mendukung kapitalis buruh namun hanya eksploitasi. Dalam artikel ini digambarkan bagaimana eksploitasi tenaga kerja dengan sistem paksa untuk memenuhi kebutuhan produksi. Konsep kapitalisme Jawa memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan kapitalisme ala Barat. Ada perubahan peran dari *peasant* menjadi *farmers*. Hal itu terlihat ketika petani dipecah antara petani kaya dan petani miskin. Pada dasarnya non-farm activities dalam artikel ini terlihat pada transformasi petani menjadi kelas buruh. Hal inilah yang oleh Roger Knight dalam artikelnya belum disinggung lebih dalam, terkait bagaimana sebenarnya proses pemecahan antara petani miskin dan kaya serta bagaimana bentuk transformasi petani menjadi kelas buruh.

Artikel Roger Knight ini hanya menempatkan industri gula dan penanaman tebu sebagai industri kapitalis. Namun bagaimana memenuhi kebutuhan kapitalis itu kemudian belum disinggung lebih banyak. Oleh karena itu, melalui 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu ini merupakan bentuk ekonomi kapitalis ala industri gula. Namun proses dialogis juga perlu ditempatkan secara

utuh, Buruh mana yang kemudian direkrut dan mengapa buruh yang lain tidak ada di dalamnya. Elson misalnya menunjukkan daerah penelitian sebagai daerah khusus gula yang bertransformasi dari beras ke gula. Buruh tani ini kemudian tidak semua terakses di pabrik gula, buruh angkut, buruh tanam serta saluran irigasi harus laki-laki yang terseleksi. Sedang dalam kasus di Jawa Utara seperti Pekalongan dan sekitarnya, buruh direkrut dari luar seperti Batang dan Weleri. Hal inilah yang kemudian menyebabkan petani protes, mengapa kemudian tidak dimasukkan dalam *outsourcing*. Bentuk upaya atau *moneytisasi* merupakan bentuk inti dari kapitalis. Hal ini senada dengan pandangan Arthur van Schaik bahwa buruh sebenarnya bisa didatangkan dari luar. Buruh yang berada di penguasa lokal atau buruh bebas dapat dua sumber pendapatan dari kolonial dan penguasa lokal. Sedangkan buruh kontrak tidak demikian, buruh kontrak merasa ada ketimpangan sehingga menyebabkan konflik salah satunya jam kerja dan jaminan sosial. Artikel Roger Knight tidak memperlihatkan demikian, padahal buruh merupakan salah satu bagian dari proses kapitalisasi.

Artikel Roger Knight belum melihat bagaimana relasi sosial dari tanam paksa membentuk masyarakat Jawa secara utuh, khususnya di Pekalongan. Sistem ini secara tidak langsung menghancurkan lapisan elit lokal karena menjadi kompetitor bagi industri gula. Oleh karena itu, peran elit lokal ini kemudian dilemahkan menjadi pejabat bergaji dalam barisan atau biasa disebut dengan *pangreh-praja* (Cahyono, 2005). Munculnya buruh yang kemudian menjadi salah satu fokus dari bahasan artikel Roger Knight adalah jawaban atas masalah demografi. Pada tahun 1795, penduduk Pekalongan hanya 136.348 jiwa meningkat menjadi 233.300 jiwa pada 1830. Menurut Bleeker, pada tahun 1845 penduduk Pekalongan terdiri atas 332 orang Eropa, 235.535 orang Jawa, 2.434 orang Cina, 180 orang Melayu dan Benggali, 366 orang Arab, dan 129 orang budak (Bleeker dalam Wasino & Hartatik, 2017). Ini yang kemudian oleh Roger Knight belum dihubungkan, kepadatan penduduk kemudian tidak bisa diatasi oleh sistem ekonomi pedesaan ini menjadikan kelas buruh kemudian muncul. Transformasi masyarakat dari petani yang mengolah tanah desa ke penjual tenaga kerja baik dalam bentuk buruh kontrak atau buruh bebas ini belum disinggung oleh Roger Knight.

Artikel Roger Knight hanya berfokus pada materi dalam hal ini penanaman tebu dan industri gula. Padahal jika berbicara tentang kapitalisme, modal menjadi salah satu aspek penting untuk dikaji. Bagaimana kemudian modal itu datang untuk menjalankan penanaman tebu dan industri gula pada masa tanam paksa, ini yang agak oleh Roger Knight terlewat untuk dibahas. Modal merupakan pondasi penting dalam perkembangan industri gula pada masa ini. Menurut Van Niel, penyertaan modal dalam tanam paksa bukan dari orang Barat, melainkan dari beberapa pihak di Jawa seperti pensiunan pegawai negeri, perusahaan ekspor-impor, dan saudagar Cina (Perdana, 2019). Modal-modal tersebut kemudian dibagi untuk penggunaan areal pertanahan, organisasi tenaga kerja, pembagian kerja, penggunaan tenaga kerja upahan, penggunaan teknologi, sistem administrasi dan birokrasi serta penanaman tanaman komersial.

Sistem ekonomi uang mulai dikenal ke dalam lingkungan pedesaan agraris, kehidupan tradisional dan subsisten kemudian berubah dengan adanya komersialisasi produksi pertanian dan pasaran kerja. Hal itu merupakan akibat lain dari adanya sistem tanam paksa ini sehingga kurangnya produksi tanaman pokok

seperti beras. Melalui ekonomi uang ini kemudian mereka bergantung pada dunia luar karena beras yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga petani. Pembentukan modal di desa dengan adanya sistem ekonomi uang ini perlahan kemudian menyingkirkan sistem ekonomi petani Jawa yang sebelumnya bersifat subsisten (Kurniawan, 2014). Diferensiasi petani di pedesaan sudah selayaknya dimunculkan lebih dalam pada artikel Roger Knight. Bagaimana modal dan industri itu hadir kemudian menyebabkan adanya jurang sosial yang membedakan antara petani kaya dan petani miskin. Petani kaya menjual tenaga untuk upah serta dapat menjarah dan memilih tanah-tanah subur (Perdana, 2019). Sedangkan di pada lapisan petani miskin mendapat tanah olah-gilir yang kualitasnya buruk sehingga cenderung untuk menolak pemberian tanah dan menyebabkan suatu konflik.

'Campaign'/Kerja Pasca Panen Budidaya Tebu: Antara Elite Desa, Petani Kaya dan Buruh Tani

Organisasi industri gula era tanam paksa sangatlah kompleks, salah satunya tercermin dalam cara penyediaan tenaga kerja. Pengorganisasian buruh untuk pemanenan, pengangkutan dan tenaga kerja pabrik ada dalam gagasan Van den Bosch. Pada beberapa pabrik gula, sebagian tenaga kerja diambil dari orang terampil dan diberi uang muka. Namun, sebagian besar kontraktor gula menyatakan bahwa tidak mungkin untuk meningkatkan tenaga 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu yang memadai dan diandalkan. Melalui perintah residen dan bawahannya, priyayi serta kepala desa, 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu dilakukan untuk melakukan wajib militer dalam bentuk kerja rodi kaum tani. Mereka melakukan sebagian besar panen tebu dan pekerjaan berat di penggilingan, rumah perebusan dan gudang pengepakan yang merupakan inti dari pabrik gula pada umumnya. Sedangkan bisnis pengangkutan tebu yang dilakukan tanpa bantuan formal untuk wajib militer.

Pada tahun 1865-1866, pemberian kuli pemerintah untuk tenaga kerja 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu dihentikan oleh kolonial. Hal ini merupakan bentuk daripada oposisi atau pengkritik kerja paksa yang berkembang sampai parlemen Belanda. Perkembangan lebih lanjut dari kondisi demikian adalah penghapusan sistem tanam paksa. Hal itu kemudian berdampak pada hilangnya kuli pemerintah dari 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu di setiap tempat di Jawa. Posisi mereka kemudian digantikan oleh *vrijwilliger* (sukarelawan). Kerja paksa kemudian digantikan dengan pembebasan di sektor produksi melalui sukarelawan yang diberikan melalui elit desa. Menurut beberapa ahli seperti Fasseur, Van Niel, Breman dan Elson, adanya tenaga kerja bebas adalah respon kondisi ekonomi pedesaan Jawa pada 1860-an. Namun hal itu kemudian terhambat karena elite desa. Seperti yang dikatakan Elson bahwa tahun 1860-an saat kuli pemerintah ditarik dari 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu, pemimpin desa pribumi mengambil alih kekuasaan dengan mengendalikan petani. Pabrik-pabrik gula juga direbut oleh elite desa ketika pemerintah kolonial lengser. Struktur pra-kapitalis bertahan dalam kerangka produksi kapitalis untuk pasar dunia dan dieksploitasi melalui pengumpulan tenaga kerja.

Knight memberi contoh pada kasus yang terjadi di Pabrik Gula Wonopringgo, Pekalongan. Pada awal hingga pertengahan abad 19, sejumlah orang tak bertanah di daerah dimana tempat pabrik Wonopringgo akan didirikan. Mereka adalah

penggarap tanah namun tidak memiliki tanah sendiri, dan bergantung pada petani pemilik tanah. Ketika puncak 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu terjadi, sebagian mereka sebanyak seribu lebih dipekerjakan untuk tenaga kerja. Pada 1858 melalui adanya tuntutan dari karesidenan mengenai pengurangan jumlah kuli. Namun manager pabrik tetap bersikukuh untuk mempekerjakan mereka dengan paksa, bahkan sejumlah gelandangan yang ada di daerah tersebut juga dipaksa untuk bekerja. Mereka semua harus tunduk pada perintah, tidak dapat mengatur waktu sendiri dan tidak secara bebas menjual hasil produksi.

Pada tahun 1860-an, elite desa serta priyayi dan kepala desa menjadi kelompok yang memiliki kekuatan dan keuntungan besar sebagai perantara tenaga kerja untuk industri gula. Selain itu, mereka juga menyediakan kerja paksa bagi 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu setelah pemerintah kolonial mundur. Dalam sistem perekrutan tenaga kerja 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu, terdapat pula praktek kolusi antara manajemen pabrik dan priyayi seperti yang terjadi di Pekalongan akhir tahun 1850-an. Peran yang dimainkan oleh para priyayi dan kepala desa dalam perluasan industri gula di bawah naungan Sistem Tanam Paksa. Yang pertama adalah bahwa meskipun terminologi (bupati, priyayi, wedana, lurah dan sejenisnya) mungkin termasuk dalam tatanan prakapitalis tradisional, fungsi-fungsi rakyat yang ditunjuk secara substansial dibentuk kembali dan posisi mereka dalam negara kolonial yang didefinisikan ulang. Mengutip peran mereka dalam proses produksi sebagai bukti dari karakter pra-kapitalisnya.

Sebuah Kritik Atas Konsep 'Campaign'/Kerja Pasca Panen Budidaya Tebu

Desa sebagai satu unit ekonomi yang di dalamnya tidak hanya relasi kekuasaan dibangun, tetapi juga menjadi *running* proses kekuasaan terhadap sistem ekonomi pedesaan yang berbasis agraria. Hal ini berbanding lurus dengan apa yang terjadi di Wonopringgo dimana kolonial kemudian membentuk suatu hegemoni untuk mengerahkan masyarakat desa berpartisipasi dalam industri gula. Petani menjadi terekstraksi oleh kapitalis dan harus membagi lahannya. Dalam artikel ini mereka harus membagi lahannya untuk penanaman tebu. Hal yang tidak banyak disinggung oleh Roger Knight adalah *land use management* dan *labour management*. Keduanya tentunya menarik jika dikaitkan dalam artikel ini dengan bagaimana buruh-buruh industri gula itu dibagi dan diatur untuk melakukan 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu.

Dalam hal intervensi kolonial semakin berkurang di suatu desa karena adanya proses otonomi desa. Hal ini terlihat dalam artikel ini bahwa elite desa menyediakan tenaga kerja untuk industri gula. Pada level makro memang kemudian menjadikan desa berkembang, namun pada level mikro keberadaan elite desa menjadikan desa tidak berkembang. Elite desa mengatur semuanya, misal saat dipegang kolonial gaji tenaga kerja akan tetap. Namun ketika elite desa berkuasa gaji mereka tidak tetap, karena adanya transformasi buruh kontrak menjadi freelance (buruh bebas). Misalnya pengaturan budidaya usaha tebu melalui sistem tanam paksa ini membuat kolonial mampu meningkatkan ekspor dari 6,71 ton tahun 1830 menjadi 61,75 ton tahun 1840 (Wahyuni, 2009). Usaha petani untuk memenuhi tuntutan kerja ini kemudian berdampak terhadap pertambahan penduduk. Tidak ada perang dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui vaksinasi untuk meredakan epidemie juga disinyalir menjadi faktor peningkatan jumlah penduduk (Hanafi &

Nawiyanto, 2022). Antara 1830 sampai 1870, produksi gula terus meningkat dari 40.500 ton menjadi 405.000 ton setahun. Perkembangan areal penanaman, produktivitas per hectare yang menimbulkan peningkatan produksi dengan cepat. Faktor penanaman dan pemeliharaan tebu yang intensif juga menjadi faktor peningkatan produksi yang dibarengi dengan teknologi modern pada alat produksi (Mubyarto, 1984). Hal inilah yang kemudian oleh Roger Knight belum disinggung lebih banyak, mengenai bagaimana sebenarnya kolonial berusaha menjamin tenaga kerja termasuk dalam hal kesehatan yang kemudian berdampak terhadap perbaikan kualitas hidup dan meningkatkan jumlah penduduk.

Kelebihan dan Kekurangan Artikel Roger Knight

Roger Knight melalui tulisannya ini berhasil membahas secara detail mengenai mobilisasi tenaga kerja untuk 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu industri gula di Jawa pertengahan abad ke-19. Di daerah pabrik Wonopringgo yang digunakan untuk budidaya tebu dan perekrutan tenaga kerja, terdapat kaum tani tak bertanah. Setelah adanya ekspansi industri yang ditetapkan pemerintah pada 1830-an, pabrik Wonopringgo dan beberapa pabrik gula di Jawa Timur dan Jawa Tengah menghadapi beberapa masalah dan pekerja pabrik. Bisnis penanaman tebu langsung diurus oleh pemerintah menggunakan buruh tani. Roger Knight juga membahas secara detail bagaimana tenaga kerja dieksploitasi oleh priyayi, kepala desa dan pejabat residen serta pemilik tanah. Roger Knight juga memberi gambaran jelas bagaimana akibat dari permasalahan dalam industri gula, pada pertengahan tahun 1860-an Pemerintah Hindia pertama kali memerintahkan pengurangan, diikuti dengan penghentian total pasokan selama 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu, sebagian besar pabrik gula merasa lebih mudah untuk merekrut tenaga kerja secara langsung. Para pemimpin pedesaan semacam ini hanya dapat bertindak sebagai perantara tenaga kerja karena perkembangan di pedesaan telah menciptakan situasi di tahun 1860-an di mana sektor proletar dari kaum tani telah tersingkir dari mata pencaharian sebelumnya di pertanian desa. Banyak kemudian tanah yang tak bertanah ataupun ditinggalkan petani pemilik tanah yang terpinggirkan untuk mencari pekerjaan lain.

Adapun kekurangan dari tulisan ini adalah Roger Knight belum memberi gambaran secara jelas mengenai bagaimana kebutuhan kapitalis dipenuhi. Ia juga belum menyinggung banyak mengenai bagaimana bentuk transformasi petani menjadi kelas buruh sebagai bagian dari kapitalisme. Selain itu, transformasi masyarakat dari petani yang mengolah tanah desa ke penjual tenaga kerja baik dalam bentuk buruh kontrak atau buruh bebas ini belum disinggung oleh Roger Knight. Modal dan *moneytisasi* juga layak dibahas lebih jauh untuk melihat motivasi mobilisasi tenaga kerja dilakukan. Pembagian buruh industri di 'campaign'/kerja pasca panen budidaya tebu serta jaminan fasilitas kolonial untuk kesejahteraan tenaga kerja yang berdampak pada hasil produksi dan perbaikan taraf hidup juga belum banyak dibahas oleh Roger Knight.

Daftar Pustaka

Cahyono, E. (2005). *Pekalongan 1830-1870: Transformasi Petani Menjadi Buruh Industri Perkebunan*. Edi Cahyono's Experience

- Hanafi, S., & Nawiyanto. (2022). *Tanam Paksa di Karesidenan Tegal: Kajian Tentang Sistem, Pelaksanaan dan Dampaknya (1830-1870)*. *Historia: Jurnal Ilmu Sejarah*, 5(1), 30-47. <https://doi.org/10.19184/jhist.v4i2.27840>.
- Kurniawan, H. (2014). Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 163-172. <https://core.ac.uk/download/pdf/127701153.pdf>.
- Manshur, F. M. (2019). Kajian teori formalisme dan strukturalisme. *SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities*, 3(1), 79-93. <https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.43888>.
- Mubyarto. (1984). *Masalah Industri Gula di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Perdana, Y., Susanto, H., & Ekwandari, Y. S. (2019). Dinamika Industri Gula Sejak Cultuurstelsel Hingga Krisis Malaise Tahun 1830–1929. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 7(2), 227-242. <http://doi.org/10.24127/hj.v7i2.2117>.
- Wahyuni, S., & Sinuraya, J. F. (2009). Industri dan perdagangan gula di Indonesia: pembelajaran dari kebijakan zaman penjajahan–sekarang. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 27(2), 133-149. <https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/1092>.
- Wasino & Hartatik, S. E., (2017). *Dari Industri Gula Hingga Batik Pekalongan: Sejarah Sosial Ekonomi Pantai Utara Jawa pada Masa Kolonial Belanda*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.